

Kota dan Kab. Bogor Belum Terapkan Aturan Kartu Vaksin

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menerapkan sertifikat atau kartu vaksin Covid-19, untuk syarat warga beraktivitas. Saat ini, Pemkot Bogor akan mengkaji pemberlakuan kartu vaksin.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, kartu vaksin bisa diberlakukan bila vaksinasi Kota Bogor mencapai di atas 50 persen. Dia melihat, kartu tersebut bisa saja digunakan warga untuk bisa mengakses tempat publik, seperti mal, pusat perbelanjaan, atau tempat wisata.

“Kebijakan sertifikat yang diberlakukan untuk mengakses tempat-tempat, kami pastikan harus kita kaji,” kata Bima Arya, Rabu (4/8).

Dia melihat, hal pertama yang harus dilakukan yakni melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi Kota Bogor baru mencapai 36,5 persen untuk dosis pertama dan 17,8 persen untuk dosis kedua dari 819.444 sasaran.

Namun, sambung dia, percepatan vaksinasi masih tergantung stok vaksin yang diterima Kota Bogor. “Capainya 36 persen, kalau vaksinnya lancar ya akhir Agustus saya kira insya Allah sudah bisa mendekati 50 persen tapi sekali lagi tergantung stok vaksinnya,” katanya.

Kota Bogor Optimistis Bisa Turun Level

BOGOR (IM)- Angka kasus Covid-19 di Kota Bogor terus mengalami penurunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun optimistis dapat menurunkan level, dari level 4 ke level 3 selama satu pekan ke depan.

Sebelumnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 kembali diperpanjang hingga Senin (9/8) mendatang, termasuk di Kota Bogor. “Jadi kalau mau di level 3 angka penularan per harinya harus ditekan lagi sampai di bawah 100 gitu dan angka keterawatan di rumah sakitnya pun harus ditekan lagi,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Rabu (4/8).

Dia mengatakan, kasus Covid-19 di Kota Bogor saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan saat awal PPKM darurat diterapkan. Saat ini, jumlah angka positif aktif di Kota Bogor berada di angka sekitar 3.000.

Jumlah tersebut sudah jauh lebih berkurang ketika pada masa pertengahan PPKM darurat yang mencapai angka 8.000 kasus. Meski semua data itu menunjukkan kondisi sudah mulai membaik, Bima Arya mengatakan, secara umum angka kasus harian harus ditekan lagi agar Kota Bogor bisa ke level 3.

“Hari ini buat kita memang

Pandemi Covid-19, BPBD Ingatkan Perang Melawan Musuh Tak Terlihat



BOGOR (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingatkan, bahwa saat ini kita semua tengah menghadapi musuh yang tak terlihat, yakni virus Korona Covid-19. Namun demikian kita tak boleh menyerah dan melakukan berbagai antisipasi sebagai upaya penanggulangan penyebarannya.

Demikian disampaikan Kalak BPBD, Bridjen Iwan Ma'ruf Zaenudin, pada saat pertemuan virtual dengan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan, Satpol PP, dan Diskominfo dalam Kajian Operasional Membangun Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19, di Ruang Rapat Setda pada Rabu (4/8).

“Walaupun PPKM oleh Pemerintah sudah diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus, semoga perpanjangan

Bima Arya menyebutkan, DKI Jakarta dapat memberlakukan kartu vaksin agar masyarakat bisa mengakses tempat publik, karena memang capaian vaksinasi sudah tinggi. Berbeda dengan di Bogor dan daerah lain di Indonesia.

“Pemberlakuan sertifikat vaksin ini sangat tergantung juga kepada capaian target vaksin. Semakin banyak persentasenya kita bisa,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin mengatakan, Pemkab Bogor juga belum menerapkan kartu vaksin untuk menjadi syarat agar masyarakat bisa beraktivitas. Seperti belanja, dan melakukan kegiatan lainnya.

“Nggak kalau (kartu) vaksin. Kan baru digunakan kalau keluar negeri, haji, atau perjalanan naik kereta, pesawat, kapal laut, dan lain-lain,” ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini Pemkab Bogor melakukan percepatan vaksinasi baik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), puskesmas, dan GOR Pakansari. Selain itu, juga dibantu oleh beberapa pihak seperti TNI dan Polri.

“Kemarin sudah ada tambahan (vaksin) untuk rutin di fasyankes dan puskesmas setiap Senin dan Rabu, juga Kamis di Pakansari. Juga yang ikut partisipasi, kita juga berikan,” ujarnya. ● **gio**

jauh lebih membaik, angkanya masih 60 persen, tetapi sekali lagi kalau mau level 3 harus ditekan lagi,” tegasnya. Untuk itu, sambung dia, Satgas Covid-19 Kota Bogor melakukan beberapa langkah untuk mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan. Seperti membatasi mobilitas di sentra perdagangan, dan belum membolehkan restoran untuk membuka layanan makan di tempat.

Tak hanya itu, ganjil-genap juga kembali diperpanjang hingga PPKM level 4 berakhir. Bima Arya menuturkan, Satgas Covid-19 Kota Bogor juga fokus melakukan testing dan tracing dengan perbandingan 1:15.

“Ganjil genap tetap kita lanjutkan, kemudian fokus juga kita arahkan kepada kegiatan testing dan tracing di targetkan 1:15 dalam waktu 72 jam. Jadi satu kasus positif harus sudah terlacak dalam waktu 72 jam, kita perkuat kembali tim tracing,” jelasnya.

“Kita kemudian kita terus perkuat perawatan isolasi mandiri (isoman), jangan sampai ada perburukan sehingga dibawa ke rumah sakit. Juga PPKM ditingkat wilayah diperkuat lagi dari camat, lurah, RT/RW kita perkuat lagi,” kata dia. ● **gio**

8 Nusantara



WAKASAL MENINJAU VAKSINASI MASSAL DI BOGOR

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (kiri) didampingi Bupati Bogor Ade Yasin (kedua kiri) saat meninjau Serbuan Vaksin Angkatan Laut di Stasiun Pemancar Radio TNI AL, Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8). Sebanyak 2.191 vaksin disiapkan TNI AL untuk warga dalam rangka percepatan vaksinasi nasional.

TERKAIT PERMINTAAN PHRI

Ade Yasin Kabulkan Relaksasi Pajak Tapi Tolak Kelonggaran Tagihan Listrik

Para pelaku usaha jasa wisata diminta memaklumi atau memahami jikalau pemerintah pusat ataupun daerah masih menerapkan aturan PPKM Level 4. “Saya minta kita sama-sama memaklumi dan memahami kebijakan PPKM level 4 ini masih diberlakukan demi kepentingan (kesehatan dan keselamatan) masyarakat,” kata Ade Yasin.

CIBINONG (IM)- Harapan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor agar ada keberpihakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4,

tidak bisa dikembalikan Bupati Bogor, Ade Yasin.

Ibu dua orang anak ini pun meminta para pelaku usaha jasa wisata tersebut memaklumi atau memahami jikalau pemerintah pusat ataupun

daerah masih menerapkan aturan PPKM Level 4.

“Kepada pengurus dan anggota PHRI, saya minta kita sama-sama memaklumi dan memahami jikalau kebijakannya masih PPKM level 4 masih diberlakukan demi kepentingan (kesehatan dan keselamatan) masyarakat,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Rabu, (4/8).

Politisi PPP ini menambahkan untuk permintaan relaksasi pajak daerah, jajar Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor sudah melakukan relaksasi pajak.

“Relaksasi pajak daerah seperti diskon, penghapusan sanksi denda maupun lainnya kami berlakukan lagi di tahun ini untuk mengurangi beban (pengusaha hotel dan restoran),” tambahnya.

Terkait permohonan agar Pemkab Bogor menyurati PLN agar memberikan kelonggaran pembayaran tagihan listrik, Ade menjelaskan hal itu sulit dilakukan karena berbeda jalur.

“Pemkab Bogor tidak bisa menyurati PLN terkait permohonan kelonggaran pembayaran tagihan listrik hotel maupun restoran karena berbeda jalur. (Karena keterbatasan anggaran) kami juga meniadakan bantuan sosial buat pegawai hotel dan restoran,” jelas Ade.

Diwawancara terpisah, Wakil Ketua PHRI Bidang Organisasi dan Promosi Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto mengungkapkan dirinya memahami pernyataan Bupati Bogor, Ade Yasin.

“Kami memaklumi pernyataan beliau, terutama tentang

keterbatasan kewenangan. Untuk program relaksasi pajak daerah, kami menunggu sosialisasinya seperti apa,” ungkap Boboy.

Dalam kesempatan ini, pria yang mudah bergaul ini mengharapkan pihak hotel dan restoran kembali mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Harapan kami bukan hanya mendapatkan lagi dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi juga meningkatnya besar dana hibah dan kemudahan syarat-syarat pencairannya, karena salah satu alasannya banyak hotel yang berdiri, syarat atau aturannya baru terbit setelah bangunan hotel terbangun,” harapnya. ● **gio**

Bupati Bogor Tolak Longgarkan PPKM Kawasan Wisata Puncak

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin memastikan tetap diperketat destinasi wisata di kawasan Puncak, usai PPKM Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.

“Sebetulnya di Kabupaten

Bogor masuknya level tiga. Tapi, karena di Jabodetabek rata-rata level empat, jadi kita ikut,” kata Ade Yasin, Rabu (4/8).

Dia khawatir, jika ada pelonggaran di Kabupaten Bogor, warga dari daerah lain justru berbondong-bondong

mendatangi Bumi Tegar Beriman. “Kalau kita longgarkan, nanti dari daerah lain masuk dan malah jadi zona merah. Jadi diupayakan seragam kebijakannya,” kata Ade.

PPKM Level 4 diperpanjang kembali hingga 9 Agus-

tus 2021. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat akun Youtube Sekretariat Presiden dari Istana Bogor, Senin (2/8).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut PPKM Level 4 yang diberlakukan sejak 26 Juli

hingga 2 Agustus 2021 telah membawa perbaikan di skala nasional. perbaikan tersebut meliputi konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, kesembuhan hingga persentase ketersediaan tempat tidur rawat atur BOR. ● **gio**

DPRD Jabar Bahas Perda Pusat Distribusi di Bekasi

BANDUNG (IM)- Setelah konsep membangun Provinsi Jawa Barat melalui jalur distribusi diterima Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, kini pembahasannya sudah dimulai di Kabupaten Bekasi.

Setidaknya, hal itu menjadi salah satu bahasan dalam kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi ke Pejabat Bupati Bekasi, Dr H Dani Ramdan MT, Selasa (3/8) siang.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid, Jejen Sayuti dan Achdar Sudrajat, Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong.

Dalam kunjungan kerja tersebut, inisiator membangun Provinsi Jawa Barat melalui jalur distribusi, Faizal Hafan Farid mengatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur pusat distribusi Provinsi Jawa Barat sudah disahkan melalui Sidang Paripurna



DPRD Jawa Barat masa sidang II 2019/2020 di Gedung DPRD Jawa Barat, setahun lalu. “Saya sendiri sebagai ketua pansus-nya pada saat itu,” kata Faizal.

Dia berharap dengan disahkannya Perda tentang Pusat Distribusi dapat melindungi pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. “Selain itu kita berkeinginan membangun pusat distribusi di tanah pasundan ini,” ungkapnya.

Selain membahas pusat distribusi, dalam kunjungan tersebut juga dibahas terkait

pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bekasi. “Termasuk Desa Wisata Hegarmukti yang akan mendapat Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ungkap Faizal.

Usai menyampaikan beberapa masukan kepada pejabat Bupati Bekasi, Dr. H. Dani Ramdan MT, kunjungan kerja para putra terbaik Kabupaten Bekasi itu ditandai dengan penyerahan Buku Membangun Provinsi Melalui Pusat Distribusi karya Faizal Hafan Farid. ● **lys**



Pemkot Bogor Uji Coba Bus Listrik Gratis Satu Bulan

BOGOR (IM)- Bus listrik diwacanakan akan segera mengaspal di jalanan Kota Bogor. Mulai Rabu (4/8) hingga satu bulan ke depan, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan uji coba operasi satu bus listrik.

Bus listrik BYD C6 itu diterima Wali Kota Bogor, Bima Arya dari PT. Bakrie Autoparts, Selasa (3/8) kemarin. Sistemnya pinjam pakai. Dalam uji coba itu akan dibuka layanan gratis atau mengangkut penumpang secara gratis selama satu bulan ini.

Menurut Bima Arya, uji coba perlu dilakukan untuk kesiapan sebelum bus-bus listrik resmi mengaspal di jalanan Kota Bogor yang rencananya akan dimulai tahun depan.

Dia berharap dengan begitu, tahun 2024 program lainnya yakni Bogor Transportation Program (B-Top) tercapai, meski pun tidak seluruhnya. “Saya harap satu unit yang ada bisa dimaksimalkan bukan hanya dalam konteks kebutuhan mobilitas, tetapi juga yang lainnya mengingat kondisi cuaca dan medan di Kota Bogor.

Tahun depan diharapkan sudah mulai ada bus-bus listrik yang mengaspal, jadi ketika masa pengabdian sebagai wali kota berakhir saya bisa menyerahkannya kepada pengganti saya,” ungkap Bima Arya.

Kehadiran satu unit bus listrik ini menjadi salah satu pelengkap program B-Top sejak 2015, seperti konversi angkutan kota (angkot), re-routing, rencana pengadaan trem, konektivitas jalur dan lainnya. Dengan baterai ber-

daya 135 Kilowatt dan sekali pengisian baterai (charging) selama 2 hingga 3 jam, total jarak yang mampu ditempuh bus listrik ini kurang lebih sejauh 250 Km.

“Kami menyambut baik program pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan yang dilakukan Kota Bogor. Ini bentuk kontribusi kami. Sarana transportasi yang modern, aman, nyaman dan ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan keasrian Kota Bogor,” ungkap Ludi Atmo, perwakilan dari PT Bakrie Autoparts.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo menjelaskan, selama uji coba akan beroperasi di jalur bus Trans Pakuan di koridor satu, Terminal Baranangsiang - Terminal Bubulak. Dukungan pun diberikan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan menyediakan pasokan kelistrikkannya.

Seperti halnya dijelaskan Agung Wicaksono, perwakilan dari PLN UP3 Bogor, yang juga hadir pada acara serah terima. Sementara charging station yang lokasinya berada di kantor PLN UP3 Bogor, lanjutnya, menjadi kewenangan Dishub Kota Bogor. “Ini merupakan salah satu kontribusi kami untuk menyukseskan program Kota Bogor dalam mewujudkan transportasi ramah lingkungan, sekaligus mewujudkan program PLN Electrifying Lifestyle dengan menyediakan energi listrik di stasiun pengisian kendaraan bus listrik,” kata Agung. ● **gio**